

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Benua Lima Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk Tahun 2024. Renja Kecamatan Benua Lima Tahun 2024 ini disusun berdasarkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Ketujuh yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahap Persiapan. Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk pada pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perangkat daerah menyusun Renja Perangkat Daerah. Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja juga mempedomani hasil evaluasi Renja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Renja sebagaimana pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disempurnakan dengan mengacu pada surat edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran rancangan awal RKPD.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam

menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa.

Sehubungan dengan berakhirnya periodisasi Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur dan RPJMD-nya yang berakhir sebelum pelaksanaan pilkada serentak pada Tahun 2024, sehingga akan ada kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah sejak berakhirnya RPJMD Tahun 2023 sampai dengan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, disebutkan bahwa:

“Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan/atau isu strategis aktual.”

Penyusunan Renja 2024 Kecamatan Benua Lima berdasarkan Renstra 2024-2026 Kecamatan Benua Lima yang berdasar dari tujuan ke- lima Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 yaitu “Meningkatkan pemerintah yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab”, terdiri dari 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Predikat Akuntabilitas Kinerja.
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
- Jumlah kasus korupsi
3. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu.
Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.
- Nilai IKM (Nilai Interval)

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut, maka terdapat penggantian nomenklatur, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kodefikasi perangkat daerah, sehingga terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dengan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2018-2024.

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Kecamatan Benua Lima, dengan mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Benua Lima tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Benua Lima. Hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan, meliputi :
 - a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah.
 - b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah.

- c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah
 - d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mencakup:
 - (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
 - (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
 3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.
 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapplitbangda dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
 5. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan sub.kegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, sub.kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Benua Lima Tahun 2024 menjabarkan rencana kegiatan dan sub. kegiatan Kecamatan Benua Lima yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub.kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Renja Benua Lima Tahun Anggaran 2024 ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 550);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
14. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Benua Lima Tahun 2024 adalah untuk menjamin konsistensi perencanaan dengan penganggaran berupa Program Kerja yang mengarah pada Kinerja serta Tupoksi Kecamatan Benua Lima dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Benua Lima dan untuk mencapai tujuan organisasi, serta sebagai tolak ukur kinerja Kantor Kecamatan Benua Lima dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya dibidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan pada masyarakat benar-benar terarah, terukur dan tepat sasaran serta terkendali.

Tujuan Umum yaitu merencanakan dalam lingkungan yang semakin kompleks. Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era informasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat lebih prima. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Kantor Kecamatan Benua Lima tahun 2024:

1. Menjabarkan rencana kerja Kantor Kecamatan Benua Lima jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2024;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub.kegiatan Kecamatan Benua Lima dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas Kecamatan Benua Lima dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis pemerintah daerah dengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana kerja Kecamatan Benua Lima;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran Kantor Kecamatan Benua Lima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Benua Lima ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan - permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benua Lima Tahun 2018 – 2024 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Benua Lima Tahun 2022, pelaksanaan Kinerja Kecamatan Benua Lima Tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ditunjang dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

- A. Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 1.949.200.925,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.866.466.150,- (95,76%).
- B. Belanja Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp. 782.098.729,- dan terealisasi sebesar Rp. 752.904.677,- (96,27%).
- C. Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 72.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.000.000,- (100%).
- D. Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 108.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.000.000,- (100%).
- D. Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 38.701.889,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.3525.00,- (93,93%).

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Benua Lima Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

TABEL 2.1
REALISASI ANGGARAN KECAMATAN BENUA LIMA TAHUN 2022

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN KINERJA (%)
KECAMATAN BENUA LIMA	2.950.001.543,00	2.835.723.327,00	96,13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.699.012.618,00	2.591.286.827,00	96,01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.168.240,00	25.591.400,00	97,80
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26.168.240,00	25.591.400,00	97,80
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.945.820.925,00	1.863.086.150,00	95,75
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.508.887.967,00	1.435.718.144,00	95,15
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	325.452.958,00	315.888.006,00	97,06
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.480.000,00	111.480.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.503.815,00	241.798.805,00	99,30
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.157.500,00	4.686.850,00	90,87
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.020.315,00	17.958.801,00	99,66
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.023.200,00	8.011.000,00	99,85
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.987.800,00	10.965.600,00	99,80
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	6.900.000,00	6.000.000,00	86,96
Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.535.000,00	36.440.000,00	99,74
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.880.000,00	157.736.554,00	99,91
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.381.889,00	45.032.500,00	95,04
Pengadaan Mebel	15.037.000,00	14.874.000,00	98,92
Pengadaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.344.889,00	30.158.500,00	93,24
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.940.750,00	350.135.372,00	97,28
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	7.400.000,00	98,67
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.250.000,00	21.612.872,00	69,16
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.790.750,00	12.722.500,00	99,47
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	308.400.000,00	308.400.000,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.196.999,00	65.642.600,00	86,15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.626.999,00	36.448.600,00	91,98
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.690.000,00	1.860.000,00	21,40
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.380.000,00	11.834.000,00	95,59

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	229.641.415,00	226.970.500,00	89,40
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.358.615,00	107.688.000,00	97,58
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	29.700.015,00	27.166.000,00	91,47
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8.658.600,00	8.522.000,00	98,42
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	119.282.800,00	119.282.500,00	100,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00
Evaluasi Kelurahan	7.032.800,00	7.032.500,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.347.510,00	17.466.000,00	81,82
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.347.510,00	17.466.000,00	81,82
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.300.410,00	6.194.200,00	98,31
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.047.100,00	11.271.800,00	74,91
TOTAL	Rp 2.950.001.543,00	Rp 2.835.723.327,00	96,13

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Benua Lima untuk Tahun 2022 memuat beberapa program kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan alokasi anggaran sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
dianggarkan sebesar Rp. 26.168.240,-
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
dianggarkan sebesar Rp. 1.897.520.028,-
Sub.Kegiatan ini meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 1.786.040.028,- dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp.111.480.000,-
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
dianggarkan sebesar Rp. 206.408.815,-
Sub.Kegiatan ini meliputi antara lain :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 5.157.500,-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 15.745.315,-
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 8.023.200,-
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dianggarkan sebesar Rp. 10.987.800,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dianggarkan sebesar Rp. 6.900.000,-
- Fasilitas Kunjungan Tamu dianggarkan sebesar Rp. 37.735.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dianggarkan sebesar Rp. 121.860.000,-
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
dianggarkan sebesar Rp. 33.869.874,-
Sub.Kegiatan ini meliputi antara lain :
 - Pengadaan Mebel, dianggarkan sebesar Rp. 15.037.000,-
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dianggarkan sebesar Rp. 18.832.874,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
dianggarkan sebesar Rp. 362.928.250,-
Sub.Kegiatan ini meliputi antara lain :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dianggarkan sebesar Rp. 31.250.000,-
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 15.778.250,-

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 308.400.000,-
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dianggarkan sebesar Rp. 78.430.211,-
Kegiatan ini meliputi antara lain :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas, dianggarkan sebesar Rp. 39.626.999,-
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dianggarkan sebesar Rp. 8.690.000,-
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dianggarkan sebesar Rp. 17.733.212,-
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dianggarkan sebesar Rp. 12.380.000,-

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,

dengan kegiatan dan alokasi anggaran sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dianggarkan sebesar Rp. 87.978.615,-

Kegiatan ini meliputi antara lain :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dianggarkan sebesar Rp. 12.720.015,-
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dianggarkan sebesar Rp. 8.658.600,-
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dianggarkan sebesar Rp. 66.600.000,-.
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dianggarkan sebesar Rp. 212.250.000,-

Kegiatan ini meliputi antara lain :

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp. 4.250.000,-
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp. 108.000.000,-

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,

dengan kegiatan dan alokasi anggaran sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp. 21.347.510,-

Kegiatan ini meliputi antara lain :

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dianggarkan sebesar Rp. 6.300.410,-
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dianggarkan sebesar Rp. 15.047.100,-
-

Jumlah Anggaran penetapan Kecamatan Benua Lima Tahun 2023 (Tahun Berjalan) sebesar RP. 3.549.317.080,- yang terbagi dalam 6 program, 14 kegiatan.

Secara umum dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, pagu belanja terdiri dari pagu anggaran belanja tahun 2019 sebesar Rp. 2.735.419.244,18, tahun 2020 pagu anggaran belanja sebesar Rp. 3.326.117.350,00, pada tahun 2021 pagu anggaran belanja sebesar Rp. 3.084.364.153,00, pada tahun 2022 pagu anggaran belanja sebesar Rp. 2.950.001.543,00, pada tahun 2022 pagu anggaran belanja sebesar Rp. 3.549.317.080,-.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Benua Lima sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Benua Lima, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Perangkat Daerah Kecamatan Benua Lima menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah

Kecamatan Benua Lima

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Unsur Kewilayahan									
	Kacamatan Benua Lima									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah								
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang Disediakan			-	-	-			

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Tugas ASN								
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia								
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan								
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan								
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Bidang								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu								
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang								

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan								
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/ Kelurahan								
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
				PeningkatanEfektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PeningkatanEfektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Kelurahan								
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun								
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									

				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa								
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Benua Lima berisikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Benua Lima berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Benua Lima adalah:

1. Nilai SKM
2. Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Kecamatan Benua Lima mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan. Kecamatan Benua Lima dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dan pelayanan desa;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Benua Lima sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) adalah dibagi menjadi dua yaitu pelayanan bidang perijinan dan pelayanan bidang non perijinan. Terkait dengan pelayanan bidang perijinan saat ini Kecamatan Benua Lima hanya bersifat rekomendasi atau memberikan pengantar untuk ditindaklanjuti ke Perangkat Daerah terkait yaitu ke Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Timur, sambil menunggu Peraturan Bupati Barito Timur yang mengatur penyerahan urusan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Benua Lima. Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Benua Lima telah memberikan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Antara lain pelayanan perekaman KTP, KK, mutasi penduduk, pelayanan legalisasi masyarakat, pelayanan Bantuan Sosial, peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam kegiatan even-even budaya, gelar seni, kegiatan keagamaan serta pekan olah raga daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten.

Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Benua Lima
Kabupaten Barito Timur

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indek Kepuasan Masyarakat	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	-	C	C	C	CC	C	C	CC	CC	CC	
3	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	-	-	80%	85%	87%	89%	80%	85%	87%	89%	89%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis itu berasal dari kondisi lingkungan yang memiliki dampak krusial dan signifikan bagi pelaksanaan Pembangunan umumnya di Kabupaten Barito Timur dan khususnya di Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur, hal tersebut diantisipasi dengan membuat rencana strategis agar dapat diatasi, sehingga tidak menimbulkan hambatan kerugian dalam pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Benua Lima antara lain:

- Dalam bidang perencanaan yaitu masih lemahnya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dan masih rendahnya partisipasi masyarakat;
- Dalam bidang statistik yaitu masih lemahnya penyediaan dan pengelolaan data;
- Dalam bidang aparatur yaitu masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur;

- d. Dalam bidang sarana dan prasarana yaitu masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia;
- e. Dalam bidang administrasi yaitu masih lemahnya dalam pengelolaan dan penataan administrasi;
- f. Dalam bidang hukum dan tramtibus yaitu masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam masalah hukum dan tramtibus;
- g. Dalam bidang anggaran yaitu masih terbatas dan minimnya anggaran yang tersedia.

Dari isu-isu penting tersebut dapat diidentifikasi permasalahan dan hambatan dihadapi serta tantangan dan peluang yang ada sebagai berikut:

1. Permasalahan dan Hambatan

Kecamatan Benua Lima sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Benua Lima adalah:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Manusia (SDM);
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
- d. Belum optimalnya data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan;

- e. Masih lemahnya pendataan data sehingga sering ditemukan adanya perbedaan data dari desa dan kelurahan;
- f. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
- g. Belum optimalnya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang kurang sinergis;
- h. Terbatasnya anggaran yang tersedia.

2. Tantangan dan Peluang

Pengidentifikasian faktor-faktor pendukung maupun penghambat baik faktor internal atau faktor eksternal merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga tujuan organisasi dapat berhasil dengan baik.

Adapun yang menjadi tantangan dilihat dari faktor internal organisasi yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang meliputi :

- a. Kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- b. Rendahnya motivasi aparat;
- c. Kurangnya kemampuan dan ketrampilan aparat;
- d. Rendahnya disiplin aparat;
- e. Kurangnya insentif aparatur kecamatan.

Sedangkan dilihat dari faktor eksternal organisasi yaitu adanya ancaman yang diidentifikasi adanya :

- a. Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah;
- b. Kurangnya data yang valid untuk perencanaan;
- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat;
- d. Adanya mutasi pegawai kecamatan;
- e. Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.

Disamping tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organisasi yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Adapun yang menjadi kekuatan yang merupakan faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan pemimpin;
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Adanya program yang jelas;
- d. Tersedianya *job description* yang jelas;
- e. Tersedianya jumlah aparatur yang memadai.

Sedangkan yang menjadi peluang yang merupakan faktor eksternal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Adanya kesempatan mengikuti diklat bagi aparat kecamatan;
- b. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan;
- c. Adanya kewenangan di bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- d. Adanya dukungan aparat desa.

Dari analisis faktor-faktor internal dan eksternal untuk memanfaatkan kekuatan serta peluang tersebut diatas guna mendukung keberhasilan tujuan organisasi hal-hal yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Manfaatkan dukungan pimpinan untuk memanfaatkan kesempatan diklat aparat;
- b. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai guna mencukupi kebutuhan data yang valid;
- c. Manfaatkan program dan kewenangan yang jelas untuk optimalisasi bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- d. Manfaatkan *job description* yang jelas dan dukungan aparat untuk optimalisasi pembangunan;
- e. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai dan tingginya kesadaran masyarakat guna optimalisasi pembangunan;
- f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat;
- g. Mengembangkan manajemen dan mekanisme pelayanan prima masyarakat.

Disamping itu perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh yaitu:

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia Aparatur dan Masyarakat dengan memanfaatkan IT;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
5. Meningkatkan kemampuan petugas dalam menyusun kegiatan dan anggaran melalui proses partisipatif;
6. Peningkatan kemampuan pengelolaan data, informasi serta dokumen.

Dari uraian di atas, dengan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dengan mengidentifikasi kekuatan dan peluang maka dapat diambil kebijakan yang tepat sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kecamatan Benua Lima sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Benua Lima, maka diperlukan adanya Rencana Kerja Tahunan sebagai landasan penetapan kebijakan program dan kegiatan di tingkat Kecamatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

2.4 Review Terhadap Rancangan SKPD

Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Barito Timur sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Benua Lima. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting.

Secara umum, rancangan Awal RKPD Kecamatan Benua Lima telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Baplitbangda pada tahun 2024. Meskipun demikian, pada tahap

perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pagu indikatif dalam Rancangan awal diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2024. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Barito Timur

Kecamatan Benua Lima

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prpgram/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	Kec. Benua Lima	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang Disediakan	100 persen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	Kec. Benua Lima	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	42,288,080	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Benua Lima	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	1 tahun	1,224,962,995	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Benua Lima	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/ 1 tahun	1,869,793,102	
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Benua Lima	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	100 persen	153,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Benua Lima	Jumlah dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 persen	113,760,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prpgram/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Benua Lima	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan	100 persen	21,250,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Benua Lima	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	52,343,750	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Benua Lima	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka	100 persen	5,779,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Benua Lima	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka	100 persen	10,090,000	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Benua Lima	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	41,825,580	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Benua Lima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	30,761,095	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Benua Lima	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka	100 persen	10,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Benua Lima	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka	100 persen	0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prpgram/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Benua Lima	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 persen	7,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Benua Lima	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 persen	16,046,400	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Benua Lima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	15,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Benua Lima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	22,897,000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Benua Lima	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 persen	9,500,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Benua Lima	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 persen	16,650,000	
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Benua Lima	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 persen	100,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Benua Lima	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 persen	60,265,000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Benua Lima	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disediakan	100 persen	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Benua Lima	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disediakan	100 persen	246,088,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
13	Pengadaan Mebel	Kec. Benua Lima	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 persen	30,000,000	Pengadaan Mebel	Kec. Benua Lima	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 persen	30,347,400	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prpgram/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Benua Lima	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 persen	20,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Benua Lima	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 persen	29,298,245	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Benua Lima	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen	80,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Benua Lima	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen	15,000,000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Benua Lima	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 persen	32,000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Benua Lima	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 persen	35,000,000	
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Benua Lima	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	90,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Benua Lima	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 persen	17,052,000	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Benua Lima	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 persen	80,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Benua Lima	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 persen	308,400,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prpgram/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Benua Lima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	45,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Benua Lima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	54,581,632	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Benua Lima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	10,000,000	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Benua Lima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	22,290,000	
21	Pemeliharaan/ Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Benua Lima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	100 persen	6,530,493	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Benua Lima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tas	100 persen	23,250,000	
22	Pemeliharaan/ Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Benua Lima	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	100 persen	5,000,000	Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Benua Lima	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	100 persen	25,013,880	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prpgram/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										
23	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Benua Lima	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 persen	10,000,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec.Ngadi rejo	Meningkatnya pelayanan aparatur	100 persen	10.500.000,-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
24	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Benua Lima	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	42,384,082	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Benua Lima	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	0	
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Kec. Benua Lima	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	40,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Kec. Benua Lima	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	15,564,465	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prpgram/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nonperizinan					dengan Nonperizina n					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Benua Lima	Jumlah partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/ Kelurahan	100 persen	50,533,046	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Benua Lima	Jumlah partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/ Kelurahan	100 persen	77,464,290	
27	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Benua Lima	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100 persen	8,000,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	Kec. Benua Lima	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100 persen	25,980,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prpgram/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kecamatan					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Benua Lima	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 persen	13,000,000	Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Benua Lima	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 persen	96,758,000	
29	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Benua Lima	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 persen	385,000,000	Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan	Kec. Benua Lima	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 persen	384,999,845	
30	Evaluasi Kelurahan	Kec. Benua Lima	Jumlah Hasil Evaluasi Kelurahan	100 persen	4,000,000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Benua Lima	Jumlah Hasil Evaluasi Kelurahan	100 persen	3,627,040	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
31	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kec. Benua Lima	Jumlah dokumen laporan pengaduan masyarakata terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen	40,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kec. Benua Lima	Jumlah dokumen laporan pengaduan masyarakata terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen	2,500,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prpgram/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Benua Lima	Jumlah dokumen laporan pengaduan masyarakata terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen	11,324,490	Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Benua Lima	Jumlah dokumen laporan pengaduan masyarakata terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen	16,536,010	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											
33	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Benua Lima	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 persen	42,119,184	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Benua Lima	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 persen	2,000,000	
34	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Benua Lima	Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 persen	40,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Benua Lima	Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 persen	0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prpgram/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
35	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Benua Lima	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 persen	30,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Benua Lima	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 persen	18,127,940	
36	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Benua Lima	umlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100 persen	41,854,286	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Benua Lima	umlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100 persen	64,544,025	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tujuan umum pembangunan adalah untuk mewujudkan suatu keadaan dengan mantapnya sikap dan perilaku mandiri masyarakat sesuai prinsip demokrasi, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terwujudnya kesejahteraan warga masyarakat yang selaras, adil dan merata dalam pelaksanaan pembangunan, serta terciptanya landasan yang mantap untuk pembangunan berikutnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu disusun mekanisme kerja perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkat Desa/ Kelurahan hingga Nasional yang melibatkan seluruh *stakeholders*. Dalam Musrenbang diharapkan peran aktif masyarakat untuk mendata permasalahan- permasalahan, kebutuhannya dan mencari jalan terbaik pemecahan masalah tersebut.

Penyusunan RKPD Kecamatan Benua Lima dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Usulan dalam Musrenbang di tingkat Desa/ Kelurahan sebagian besar dapat diakomodir dan difasilitasi dari program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di tingkat Desa sedangkan untuk skala yang lebih besar diakomodir oleh Dinas Teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kecamatan Benua Lima bersama pemangku kepentingan se Kecamatan Benua Lima mengidentifikasi permasalahan permasalahan yang ada di tengah masyarakat Kecamatan Benua Lima dan mencari alternatif pemecahan permasalahan secara bersama- sama dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Barito Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	

Keterangan: Kecamatan Benua Lima tidak ada dana POKIR dari DPR.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan yang mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2018- 2024 serta pertimbangan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi Bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2018-2024 adalah:

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai Negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan perBenua Limagan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan IPTEK dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor impor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peran UMKM dan Koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

b. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan.

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian

peternakan dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan Benua Lima lainnya, meningkatkan produksi dan ragam sumber daya energi.

c. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, jalan dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran Pemerintah-Swasta.

d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim.

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim adalah melalui pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup, mengurangi resiko bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

e. Penyiapan Landasan Pembangunan Yang Kokoh

Landasan Pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien, meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

f. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.

Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta berkembangnya jaminan kesehatan; meningkatkan dan membantu produk unggulan daerah lewat UMKM dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan wawasan.

g. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatnya kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan pedesaan; mempercepat penetapan rencana kerja tata ruang wilayah dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan

Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Penekanan pada faktor-faktor kunci keberhasilan dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan benar-benar telah memperhatikan faktor lingkungan dan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Adapun Misi Kantor Kecamatan Benua Lima adalah:

1. Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan.
3. Meningkatkan Koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antar lembaga masyarakat, pemerintah desa, kelembagaan adat/Dinas/Badan Lingkup Kabupaten Barito Timur.
4. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian kearifan lokal, situs budaya dan keanekaragaman budaya lokal.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak pemerintah Kabupaten/ Propinsi/Pusat Swasta guna memajukan potensi dan pengembangan kawasan industri dan pariwisata.

Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan memberikan gambaran terhadap hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Benua Lima secara nyata melalui program dan kegiatan dalam rumusan yang lebih bersifat spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu dengan disertai indikator sasaran. Penetapan sasaran Kantor Benua Lima Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengoptimalisasi kualitas pelayanan publik melalui standar pelayanan minimal;
2. Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan sumber daya aparatur dengan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan kapasitas pendidikan dan pelatihan;
3. Berfungsinya sarana dan prasarana fisik dengan peningkatan kualitas dan kuantitas yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan tertib administrasi yang ditunjang oleh sistem informasi manajemen;

5. Melaksanakan fungsi organisasi sesuai dengan tupoksi secara maksimal;
6. Meningkatkan pengembangan dan kearifan lokal;
7. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait ataupun investor guna memajukan potensi wilayah kecamatan.

3.3 Program dan Kegiatan

PROGRAM

Program merupakan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan kebijakan strategis. Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan kebijakan strategis. Sebuah program dapat mempunyai keterkaitan dengan salah satu sasaran atau lebih. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas, Prpgram Kecmatan Benua Lima TA.2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

KEGIATAN

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Rencana tindakan menurut kegiatan rinci dari program strategis selama kurun waktu tertentu dan menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan serta sebagai tolak ukur dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu maka kegiatan untuk tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Program dan Kegiatan sebelum dan sesudah perubahan yang tertuang pada Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, terdiri dari 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) kegiatan, untuk masing-masing program dan kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah,
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan,
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa,
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 3,765,772,199,- Rincian rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur sebagaimana tertera dalam tabel T-C. 33 sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program SOPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SOPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SOPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SOPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SOPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk

menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Kecamatan Benua Lima yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kec. Benua Lima dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Timur namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Prov, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

BAB V

PENUTUP

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat juga dituntut untuk bekerja secara profesional, optimal, sistimatis, efektif dan efisien.

Diperlukan adanya persiapan dan arah yang jelas dalam setiap program yang dibuat, sehingga dengan program yang jelas akan dapat dilakukan kegiatan yang dapat mendukung realisasi pencapaian program itu sendiri.

Renja Kecamatan Benua Lima Tahun 2024 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Benua Lima. Renja ini secara umum menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Benua Lima serta indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Diharapkan tugas dan fungsi Kecamatan Benua Lima dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Renja Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Tahun 2024, semoga dapat bermanfaat dan dapat sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2024.

CAMAT BENUA LIMA

MAHADANI, S.AP.,MM
NIP. 19750102 200604 1 004